

Analisis Kebijakan Politik Luar Negeri: Menganalisis Strategi Diplomasi Malaysia di Era Kepemimpinan Anwar Ibrahim

Nailul Inayah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
10030221079@student.uinsby.ac.id

Cikal Jalu Ghazy Farhan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
10040221085@student.uinsby.ac.id

Haider Arkananta

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
10040221099@student.uinsby.ac.id

Abstract

This research aims to investigate in depth and analyze Malaysia's diplomatic strategy during the leadership period of Anwar Ibrahim, a figure who had a significant impact on the direction of the country's foreign policy. The main focus of this research is on the diplomatic strategy adopted by Malaysia at the global level, involving aspects of bilateral relations, participation in international organizations, as well as handling global issues which are the main focus. The objectives of this research include an in-depth analysis of Malaysia's diplomatic strategy under the leadership of Anwar Ibrahim, assessing the effectiveness of foreign policy in strengthening bilateral relations with key countries, examining Malaysia's contribution in the context of international organizations and multilateral cooperation, and evaluating Malaysia's response to issues global and its impact on the country's image in the international arena. The scope of the research covers the period of Anwar Ibrahim's leadership, with a focus on the relevant time span for analyzing the foreign policy implemented during that period. Key aspects covered include the evolution of bilateral relations, Malaysia's role in international organizations, as well as responses to global issues that emerged during the research period. This research is expected to make a significant contribution in understanding Malaysia's role in the dynamics of international relations, explore the country's contribution to international organizations, and present the impact of diplomatic strategies under Anwar Ibrahim's leadership on Malaysia's image and position at the global level. However, this research also has limitations related to limited data and subjective interpretation of foreign policy.

Keywords: Anwar Ibrahim, Malaysia, Diplomacy

Article History: Received 17 April 2025, Revised 20 April 2025,
Accepted 15 May 2025, Available online 30 May 2025

Copyright: © 2025. The authors.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam dan menganalisis strategi diplomasi Malaysia selama periode kepemimpinan Anwar Ibrahim, seorang tokoh yang memiliki dampak signifikan dalam arah kebijakan luar negeri negara. Fokus utama penelitian ini adalah pada strategi diplomasi yang diadopsi oleh Malaysia di tingkat global, melibatkan aspek hubungan bilateral, partisipasi dalam organisasi internasional, serta penanganan isu-isu global yang menjadi fokus utama. Tujuan penelitian ini mencakup analisis mendalam terhadap strategi diplomasi Malaysia di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim, menilai efektivitas kebijakan luar negeri dalam memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara kunci, meneliti kontribusi Malaysia dalam konteks organisasi internasional dan kerjasama multilateral, serta mengevaluasi respons Malaysia terhadap isu-isu global dan dampaknya terhadap citra negara di arena internasional. Ruang lingkup penelitian mencakup periode kepemimpinan Anwar Ibrahim, dengan fokus pada rentang waktu yang relevan untuk menganalisis kebijakan luar negeri yang diimplementasikan selama masa tersebut. Aspek-aspek kunci yang dicakup mencakup evolusi hubungan bilateral, peran Malaysia dalam organisasi internasional, serta respons terhadap isu-isu global yang muncul selama periode penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami peran Malaysia dalam dinamika hubungan internasional, menggali kontribusi negara ini dalam organisasi internasional, dan menyajikan dampak strategi diplomasi di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim terhadap citra dan posisi Malaysia di tingkat global. Kendati demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan terkait dengan keterbatasan data dan interpretasi subjektif atas kebijakan luar negeri.

Kata Kunci: *Anwar Ibrahim, Malaysia, Diplomasi*

Pendahuluan

Sejak berakhirnya Perang Dunia II (1939-1945) dan awal Perang Dingin (1947), perkembangan dalam politik luar negeri (polugri) Malaysia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Pada periode tersebut, kebijakan polugri Malaysia terbentuk ¹melalui pengaruh situasi geopolitik yang rumit, terutama akibat persaingan antara Amerika Serikat (AS) di Blok Barat dan Blok Soviet di Blok Timur. Selama masa Perang Dingin, Malaysia memilih untuk bersikap pro-Barat dan menjadi bagian dari strategi antikomunisme global yang dipimpin oleh AS. Namun, sejak menjalin hubungan diplomatik dengan Cina pada tahun 1974, kebijakan polugri Malaysia mulai mengarah pada sikap yang lebih netral.²

Perubahan tersebut terus berlangsung hingga saat ini, di mana politik luar negeri Malaysia cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan internal dan dinamika regional. Berdirinya ASEAN pada tahun 1967 dan Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971, yang menegaskan komitmen terhadap zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas dalam kerangka ASEAN, menjadi faktor-faktor kunci yang membentuk arah kebijakan luar negeri Malaysia. Sejumlah keputusan

tersebut memiliki dampak jangka panjang pada hubungan Malaysia dengan negara-negara Barat dan menentukan arah kebijakan luar negerinya.

Sebagai salah satu negara yang dinamis di kawasan Asia Tenggara, Malaysia telah memainkan peran penting dalam diplomasi regional dan global. Dalam menghadapi dinamika hubungan internasional, peran seorang pemimpin memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk arah kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam konteks ini, kepemimpinan Anwar Ibrahim di Malaysia memberikan kontribusi yang nyata terhadap orientasi dan strategi diplomasi negara ini. Anwar Ibrahim, yang menduduki posisi sebagai pemimpin politik dan diplomat, membawa visi baru terkait peran Malaysia dalam konteks hubungan internasional. Periode kepemimpinannya mencakup rentang waktu tertentu dan menyaksikan implementasi kebijakan luar negeri yang mencerminkan adaptasi terhadap perubahan global dan regional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merinci analisis strategi diplomasi Malaysia di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim.

Perubahan dinamika politik dan ekonomi di tingkat global selama periode tersebut menimbulkan kebutuhan untuk penyesuaian dalam strategi diplomasi suatu negara. Kepemimpinan Anwar Ibrahim, yang dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang, menjadi fokus utama dalam memahami evolusi kebijakan luar negeri Malaysia. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor pengaruh dan tujuan strategi diplomasi yang dijalankan, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Malaysia dalam skenario geopolitik kontemporer.

Penelitian ini akan mengulas langkah-langkah konkret yang diambil oleh Malaysia di tingkat bilateral dan multilateral, serta mengevaluasi dampaknya terhadap hubungan negara ini dengan mitra internasionalnya. Selain itu, penelitian ini akan menggali peran Malaysia dalam organisasi internasional serta tanggapannya terhadap isu-isu global yang menjadi sorotan dunia internasional pada periode tertentu.

Dengan menyelami strategi diplomasi Malaysia di bawah Anwar Ibrahim, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang substansial dalam memahami dinamika hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara dan membentuk dasar untuk analisis lebih lanjut mengenai peran Malaysia di panggung dunia.

Setelah kami telusuri terhadap beberapa penelitian, ada jurnal yang relevan dengan penelitian kami dengan judul "The Winding Road to Power"

tahun 2019 karya Herdi Sahrasad, Ma'mun Mord Al – Barbasy, Al Chaidar, Muhammad Ridwan, dan Qusthan firdaus. Anwar Ibrahim in Malaysian Politics". Jurnal ini sama seperti penelitian kami yang membahas seorang politikus asal Malaysia, yakni Anwar Ibrahim. Jurnal ini menjelaskan mengenai kehidupan Anwar Ibrahim dalam memperjuangkan politik Malaysia. Jurnal ini juga menjelaskan perjalanan Anwar Ibrahim yang pernah dipenjara pada tahun 2007 dan kembali dipenjara pada tahun 2008 dengan tuduhan disodomi. Setelah dirinya bebas, ia membentuk oposisi guna melawan Najib Razak yang menggantikan Mahathir.

Jurnal kedua yang kami temukan yang relevan dengan penelitian kami adalah jurnal dengan judul Politik Di luar negara Malaysia terhadap Indonesia, 1957 – 1976: Dari Konfrontasi Menuju Kerjasama karya Linda Sunarti pada tahun 2014. Jurnal ini membahas mengenai dinamika antara negara Malaysia dan Indonesia. Jurnal ini melihat sejarah Indonesia dan Malaysia yang mengalami pasang surut.

Metodologi Penelitian

Pendekatan metodologi yang digunakan adalah kualitatif, dengan analisis konten dokumen sebagai metode utama. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat pemerintah, diplomat, dan pakar hubungan internasional, serta melibatkan analisis terperinci terhadap dokumen resmi, pernyataan pemerintah, dan laporan diplomatik. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi diplomasi Malaysia selama periode tertentu. Ruang lingkup penelitian mencakup periode kepemimpinan Anwar Ibrahim, dengan fokus pada rentang waktu yang relevan untuk menganalisis kebijakan luar negeri yang diimplementasikan selama masa tersebut. Aspek-aspek kunci yang dicakup mencakup evolusi hubungan bilateral, peran Malaysia dalam organisasi internasional, serta respons terhadap isu-isu global yang muncul selama periode penelitian.

Kerangka Pemikiran Penelitian ini dibangun dengan mempertimbangkan beberapa dimensi kunci yang melibatkan faktor-faktor penting dalam menganalisis strategi diplomasi Malaysia di era kepemimpinan Anwar Ibrahim. Kerangka pemikiran ini mencakup aspek-aspek kebijakan yang memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan politik luar negeri Malaysia, aspek – aspek ini diantaranya:

Amerika atau China

Dalam konteks perbandingan antara Amerika Serikat dan China, Malaysia di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim terlihat lebih condong ke arah China. Kondisi ini mencerminkan pendekatan pragmatis dan independen dalam menjaga hubungan dengan dua negara besar tersebut.

Sikap Terhadap Krisis Myanmar

Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Myanmar dapat dianalisis dengan melihat konteks sejarah. Kedua negara ini memiliki sejarah kolonial yang mirip karena sama-sama pernah dijajah Inggris. Malaysia juga cenderung mendukung Myanmar secara politik, salah satunya dengan mendukung masukan Myanmar dalam keanggotaan ASEAN pada tahun 1997.

Sikap Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan

Dalam isu sengketa Laut Cina Selatan, Malaysia di bawah kepemimpinan Anwar terus menyatakan keberatannya terhadap klaim Cina atas sembilan garis putus-putus (nine-dash line). Anwar juga teguh mempertahankan hak kedaulatan Malaysia atas sebagian wilayah LCS yang mencakup bagian utara Kalimantan

Perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia

Salah satu aspek dari kebijakan luar negeri Malaysia adalah regulasi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran di Malaysia, terutama pekerja dari Indonesia sebagai tetangga dekatnya.

Secara keseluruhan, kerangka pemikiran ini mencerminkan dinamika kompleks dalam kebijakan politik luar negeri Malaysia di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim, di mana negara tersebut berusaha menjaga keseimbangan, mempertahankan kepentingan nasional, dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan negara-negara di sekitarnya.

Hasil dan Pembahasan

Politik luar negeri merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain dalam rangka mendapatkan suatu hal atau kepentingan. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) adalah suatu perangkat formula, nilai, sikap, dan arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional.³ Politik luar negeri melibatkan serangkaian mekanisme dan proses yang dijalankan oleh sistem politik suatu negara sebagai tanggapan terhadap lingkungan eksternalnya. Mekanisme dan proses pembuatan politik

luar negeri ini dikendalikan oleh sistem politik internal negara, sementara kondisi eksternal negara juga berperan dalam memengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. Terdapat tiga elemen dasar yang menjadi pokok bahasan dalam politik luar negeri, yaitu: 1) mekanisme dan sistem, 2) lingkungan eksternal, dan 3) tujuan yang hendak dicapai.

Pada dasarnya, politik luar negeri merupakan suatu bentuk kebijakan nasional atau keputusan nasional yang diarahkan kepada aktor-aktor di luar batas yuridiksi suatu negara⁴. Dengan kata lain, politik luar negeri merujuk pada cara suatu negara berinteraksi dengan entitas di luar batas wilayahnya sendiri. Sejumlah kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah suatu negara atau komunitas politik lainnya dan ditujukan kepada entitas baik berupa negara maupun non-negara dengan tujuan mencapai kepentingan tertentu.

Politik luar negeri Malaysia bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasionalnya serta memberikan kontribusi yang signifikan pada komunitas bangsa-bangsa yang adil dan setara melalui pelaksanaan diplomasi yang efektif. Selain itu, politik luar negeri Malaysia dirancang untuk memastikan keberlanjutan kedaulatan dan kesejahteraan ekonominya. Fokus utama politik luar negeri ini adalah menjaga kedaulatan negara dan mempromosikan perdamaian universal, menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara asing, serta melindungi kepentingan nasional Malaysia di tingkat regional dan internasional.

Melalui pendekatan politik luar negerinya, Malaysia berkomitmen untuk mematuhi mandat dari dunia internasional dengan tujuan memajukan perdamaian dan keamanan global. Negara ini secara aktif membina hubungan persahabatan baik dalam skala bilateral maupun multilateral, di tingkat regional dan internasional. Malaysia berhasil menjalin hubungan baik dengan berbagai negara asing dan aktif berpartisipasi dalam organisasi antarnegara di tingkat regional dan internasional. Dalam rangka mengimplementasikan politik luar negerinya, Malaysia juga meluncurkan berbagai program yang mendukung upayanya untuk memperkuat peran dan pengaruhnya dalam arena internasional.

Kebijakan luar negeri suatu negara mencerminkan kompleksitas dinamika hubungan internasional yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Dalam konteks Malaysia di bawah kepemimpinan PM Anwar Ibrahim, kerangka pemikiran telah digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek kebijakan luar negeri yang menimbulkan pertanyaan krusial. Melalui analisis

terhadap hubungan dengan Amerika dan China, sikap terhadap krisis di Myanmar, penanganan sengketa Laut China Selatan, dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang arah kebijakan politik luar negeri Malaysia pada periode tersebut.

Dalam tahap ini, kita akan merinci hasil dari analisis terhadap masing-masing aspek kebijakan luar negeri tersebut, diikuti dengan diskusi mendalam yang menggali implikasi, dinamika, dan pola yang melandasi kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan demikian, kita dapat memahami secara holistik bagaimana Malaysia di bawah Anwar Ibrahim menjalin hubungan dengan aktor global, menghadapi isu-isu regional, dan mengelola dinamika kompleks dalam konteks geopolitik Asia Tenggara.

Kondisi Keseimbangan di Hubungan dengan Amerika dan China

Selama masa pemerintahan Najib Razak dari tahun 2009 hingga 2018, arah kebijakan luar negeri Malaysia cenderung menganut kebijakan yang menekankan hubungan dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Namun, setelah berakhirnya masa pemerintahan Najib pada tahun 2018, Mahathir Mohamad kembali memegang jabatan pada tahun 2019. Dia mengubah fokus kebijakan politik luar negeri Malaysia dengan lebih memprioritaskan hubungan dengan Asia Timur, khususnya Cina dan Jepang, sebagai bagian dari strategi "Look East 2.0". Saat ini, di bawah kepemimpinan PM Anwar, terlihat bahwa Malaysia praktiknya akan lebih mengarah ke Beijing daripada Washington⁵.

Malaysia menjaga hubungan yang kuat dengan negara Amerika Serikat karena masih memiliki kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, keamanan, pertahanan, pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim, Malaysia justru mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dalam beberapa aspek kebijakan luar negeri. Peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi dengan China menjadi salah satu indikator. Keberpihakan Malaysia ke arah China terlihat dalam fokusnya pada proyek-proyek infrastruktur berskala besar, seperti proyek-proyek yang terkait dengan Belt and Road Initiative. Kerja sama ekonomi yang erat dengan China menunjukkan bahwa Malaysia memandang China sebagai mitra strategis yang memberikan peluang ekonomi signifikan. Namun, secara normatif, Malaysia akan tetap berupaya untuk menemukan keseimbangan di tengah dua kekuatan besar—AS dan Cina—dan realistis terhadap dinamika politik global. Pendekatan

semacam ini menjadi kunci dalam kebijakan luar negeri Malaysia yang cenderung fleksibel dan pragmatis.

Malaysia tentunya tidak ingin terjebak dalam perangkat naratif global, seperti perang dagang AS versus Cina, yang mungkin menghambat pengejaran kepentingan nasionalnya. Selain itu, Malaysia terlihat menerima pandangan Cina tentang konsep “rumah bersama” di Asia-Pasifik dengan lebih positif daripada pandangan Barat. Meski begitu, pemerintah Malaysia juga tetap menegaskan bahwa Cina tidak boleh mendominasi kawasan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun Malaysia memahami narasi Cina, tetap ada batasan dan kepentingan strategis yang harus dilindungi.

Pilihan Malaysia untuk memperkuat hubungan dengan China tidak harus diartikan sebagai penolakan terhadap Amerika Serikat. Lebih tepatnya, mencerminkan pendekatan pragmatis dan independen dalam mengelola hubungan bilateral. Peningkatan kerja sama dengan China memiliki implikasi ekonomi yang signifikan, terutama dalam hal investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Malaysia juga harus mempertimbangkan dampak keamanan dan geopolitik dari hubungan yang lebih erat dengan China, terutama dalam konteks ketegangan regional yang mungkin memengaruhi stabilitas di Asia Tenggara.

Pilihan Malaysia untuk lebih menggantungkan diri pada China dalam beberapa aspek kebijakan luar negeri dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencapai kemandirian ekonomi dan diplomasi. Memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai mitra, termasuk China, memberikan Malaysia lebih banyak pilihan dan fleksibilitas dalam mengelola kebijakan luar negerinya. Walaupun memperkuat hubungan dengan China memberikan keuntungan ekonomi, Malaysia juga dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keseimbangan dan independensinya. Hubungan yang erat dengan China harus dielaborasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk implikasi politik dan dampak jangka panjang terhadap keamanan regional.

Dengan demikian, analisis kondisi keseimbangan Amerika dan China di dalam kebijakan luar negeri Malaysia memberikan gambaran tentang kompleksitas dinamika hubungan internasional yang dihadapi oleh negara tersebut di era kepemimpinan Anwar Ibrahim. Keputusan Malaysia untuk meningkatkan kerja sama dengan China mencerminkan adaptasi terhadap realitas geopolitik global dan perubahan dinamika kekuatan di kawasan Asia Tenggara.

Dukungan Politik Terhadap Myanmar

Dukungan politik Malaysia terhadap Myanmar mencerminkan hubungan yang dipengaruhi oleh sejarah dan pertimbangan regional di Asia Tenggara. Kedua negara ini memiliki sejarah kolonial yang mirip, dijajah oleh Inggris pada periode yang hampir bersamaan. Hubungan ini menciptakan landasan historis yang dapat memengaruhi sikap politik Malaysia terhadap Myanmar. Sebagai anggota ASEAN, Malaysia juga menunjukkan komitmen terhadap stabilitas dan solidaritas regional, faktor yang dapat mempengaruhi dukungannya terhadap Myanmar. Sebagai contoh, dalam konteks keanggotaan Myanmar di ASEAN pada tahun 1997, Malaysia memberikan dukungan politik yang nyata. Posisi ini dapat diartikan sebagai upaya Malaysia untuk memelihara hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan mendukung integrasi regional. Meskipun ASEAN memiliki prinsip non-intervensi dalam urusan internal anggota⁶, dukungan politik Malaysia terhadap Myanmar menyoroti kompleksitas diplomasi regional di mana faktor sejarah dan kepentingan bersama memainkan peran penting dalam membentuk sikap suatu negara terhadap rekan-rekan sejawatnya.

Meskipun dukungan politik Malaysia terhadap Myanmar terutama dapat dilihat dari sudut pandang ASEAN, penting untuk diingat bahwa dinamika ini dapat dipengaruhi oleh perkembangan lebih lanjut di tingkat bilateral. Kemajuan politik, situasi hak asasi manusia, dan dinamika demokratisasi di Myanmar mungkin memberikan tantangan dan peluang baru dalam hubungan bilateral. Oleh karena itu, analisis ini memberikan landasan untuk memahami ciri khas dukungan politik Malaysia terhadap Myanmar, sekaligus menggarisbawahi kompleksitas dan keseimbangan yang diperlukan dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Konsistensi Sikap Terhadap Sengketa Laut China Selatan

Dalam menganalisis konsistensi sikap Malaysia terhadap sengketa Laut China Selatan di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim, dapat diidentifikasi bahwa Malaysia telah menunjukkan ketegasan dalam mempertahankan posisi dan hak kedaulatannya. Sikap Malaysia yang konsisten dalam menolak klaim sembilan garis putus-putus yang diajukan oleh China menjadi poin penting yang mencerminkan keberanian dan keteguhan negara ini dalam menghadapi kompleksitas geopolitik di kawasan.

Ketegasan ini tidak hanya mencerminkan keinginan Malaysia untuk mempertahankan kedaulatannya, tetapi juga dapat diartikan sebagai upaya

untuk mendorong penyelesaian damai dan adil terkait sengketa tersebut. Konsistensi sikap Malaysia juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang telah menjadi dasar bagi sejumlah negara di kawasan.

Namun demikian, konsistensi sikap Malaysia dalam sengketa Laut China Selatan juga memperlihatkan keseimbangan yang rumit dalam menjaga hubungan dengan China, yang merupakan mitra ekonomi penting bagi Malaysia. Posisi Malaysia yang kritis terhadap klaim wilayah China di Laut China Selatan menciptakan tantangan diplomatis, yang memerlukan kebijakan luar negeri yang cermat dan bijaksana untuk menjaga stabilitas regional tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Dalam menghadapi sengketa ini, Malaysia, di bawah Anwar Ibrahim, berusaha menempatkan dirinya sebagai mediator dan pendukung penyelesaian konflik yang adil. Analisis ini menyoroti kompleksitas dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang menuntut keseimbangan antara kedaulatan, kepentingan ekonomi, dan stabilitas regional.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Analisis perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Malaysia mencakup aspek regulasi yang berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan para pekerja migran, terutama mereka yang berasal dari Indonesia sebagai tetangga dekatnya. Penerapan regulasi ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan menjaga hubungan baik dengan negara tetangganya.

Hasil analisis menunjukkan adanya upaya untuk memberikan perlindungan hukum, kesehatan, dan hak asasi manusia kepada pekerja migran Indonesia di Malaysia. Langkah-langkah ini mencakup implementasi peraturan ketenagakerjaan, pembentukan lembaga pengawasan, dan penyediaan akses layanan kesehatan. Upaya tersebut mencerminkan kesadaran akan pentingnya memberikan perlindungan kepada pekerja migran, yang seringkali menjadi kelompok rentan dalam kebijakan ketenagakerjaan internasional.

Pembahasan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia dapat diperluas untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti peningkatan keamanan dan kesejahteraan, penghapusan praktik-praktik eksploitasi, dan peningkatan akses terhadap sistem hukum. Sementara itu,

tetap diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran untuk memastikan efektivitasnya. Penting untuk diingat bahwa kondisi pekerja migran dapat beragam, dan tantangan dalam perlindungan pekerja migran mungkin timbul akibat dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang terus berubah. Seiring berjalannya waktu, kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia harus terus diadaptasi dan diperbaharui untuk menjawab perubahan lingkungan dan kebutuhan pekerja migran. Dengan demikian, analisis ini memberikan landasan untuk memahami upaya Malaysia dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja migran, sambil mengidentifikasi potensi peningkatan dan pengembangan kebijakan di masa mendatang.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Malaysia di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim melibatkan serangkaian strategi dan keputusan yang mencerminkan dinamika kompleks hubungan internasional. Dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keamanan regional, dan prinsip-prinsip diplomasi, Malaysia terlihat mengambil pendekatan yang pragmatis dan independen. Kontinuitas dukungan politik terhadap Myanmar, konsistensi sikap terhadap sengketa Laut China Selatan, dan upaya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia menunjukkan adanya usaha Malaysia untuk memainkan peran proaktif dalam mewujudkan stabilitas regional sambil menjaga kepentingan nasionalnya.

Keberpihakan terhadap China dalam beberapa aspek kebijakan luar negeri mencerminkan adaptasi terhadap realitas geopolitik global dan perubahan dinamika kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Kesimpulan ini juga menggarisbawahi kompleksitas dalam mengelola hubungan bilateral, di mana Malaysia harus menjaga keseimbangan antara kemandirian ekonomi, keamanan regional, dan dinamika politik internal. Selain itu, perlunya pemantauan dan adaptasi terus-menerus terhadap kebijakan luar negeri mencerminkan respons terhadap perkembangan dinamis di tingkat nasional dan internasional. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kebijakan luar negeri Malaysia di bawah Anwar Ibrahim dan menyediakan dasar untuk refleksi tentang tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi Malaysia dalam mendukung stabilitas regional dan memenuhi aspirasi nasionalnya di panggung internasional.

References

- Affianty, D. (2015). *Analisa Politik Luar Negeri*. Ciputat: UIN Press.
- Alam, S. (2016). Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Diplomasi Modern Departemen Luar Negeri RI. *Jurnal International & Diplomacy*, 135 - 136.
- Ebbighausen, R. (2021, March 30). *Kudeta Myanmar: Sikap ASEAN yang Terpecah*. Retrieved from DW.con.
- Gunawan. (2017). Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan Internasional. *Docplayer*, 1-9.
- Hastri, E. D., & Utamle, R. R. (2022). Kolaborasi Peran Diplomasi Politik Luar Negeri Indonesia Dengan Upaya Peningkatan Kompetensi Militer Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*.
- Iannone, A. (2023, November 2). *Menyorot arah kebijakan luar negeri Malaysia di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim*. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/>
- Kurniawati, S. L. (2015). Pengertian Diplomasi dalam Studi Hubungan Internasional.
- Ma'mun, A. S. (2014, April 29). *Diplomasi Publik Dalam Membangun Citra Negara*. Retrieved from Universitas Esa Unggul - Smart, Creative and Entrepreneurial.
- Mulyono, M. T. (2017). Geostrategi Indonesia. *Kajian Lemhannas RI*.
- Wicaksana, I. W. (2007). Epistemologi politik luar negeri: 'a guide to theory'. *Jurnal Global dan Strategis*, 12 - 19.
- Yani, Y. M. (2007). Politik Luar Negeri. *Unpad*.

¹ Ma'mun, A. S. (2014, April 29). *Diplomasi Publik Dalam Membangun Citra Negara*. Retrieved from Universitas Esa Unggul - Smart, Creative and Entrepreneurial

² (Iannone, 2023). *Menyorot arah kebijakan luar negeri Malaysia di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim*

³ (Yani, 2007). *Politik Luar Negeri*, Unpad.

⁴ (Wicaksana, 2007). Epistemologi politik luar negeri: 'a guide to theory'. *Jurnal Global dan Strategis*. h. 12 – 19.

⁵ *Ibid.* Menyorot arah kebijakan luar negeri Malaysia di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim.

⁶ (Ebbighausen, 2021). Kudeta Myanmar: Sikap ASEAN yang Terpecah